



Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan di Daerah Jawa Tengah

Analysis of Central Java Regional Financial Management Transparency

Dwi Luthfiana Furqon¹, Aulia Sulfiannur Naila², Indah Fitrotun Chasanah³, Safira Nurul Aini⁴, Ashilly Achidsti⁵

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

³Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

⁴Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

⁵Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

Article history:

Diterima 14-03-23

Diperbaiki 04-04-23

Disetujui 17-04-23

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Keuangan,
Pengelolaan Keuangan,
Regulasi, Transparansi

ABSTRAK

Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan dalam mewujudkan *e-government* (Azlim, 2012), pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah hendaknya menyediakan konten di website daerah masing-masing untuk mendukung praktik tata kelola yang baik dalam hal transparansi. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu menggunakan studi literatur yang mana metode pengumpulan data ini merupakan mencari studi Pustaka. Metode *library research* ini mencari pada jurnal - jurnal internasional dan nasional yang telah terjamin kredibilitasnya serta menggunakan sumber dari media massa. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan sesuatu data yang dicari, kemudian disimpulkan untuk mendapat hasil terkait data melalui studi literatur. Hasil yang dihasilkan untuk memastikan bahwa informasi terkait pengelolaan keuangan mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat, maka seluruh informasi yang dimuat dalam suatu website minimal harus memenuhi standar ketersediaan dan aksesibilitas. Laporan keuangan di daerah Jawa Tengah mudah diakses dari 10 tahun sebelumnya oleh masyarakat umum, melalui website resmi BPKAD Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan praktik-praktik tersebut dalam pengelolaan keuangan mereka, diharapkan dapat beroperasi dengan tingkat keterbukaan yang tinggi dalam hal pendapatan, pengeluaran, dan kebijakan keuangan, yang memungkinkan masyarakat mengakses data terkait anggaran dan pelaksanaan program.

ABSTRACT

Keywords:

Accountability, Finance,
Financial Management,
Regulation, Transparency

Analysis of Financial Management Transparency in realizing e-Government, district/city governments in Central Java should provide content on their respective regional websites to support good governance practices in terms of transparency. The method used in preparing this article is using literature studies, where the data collection method is searching for literature studies. This library research method searches international and national journals whose credibility is guaranteed and uses sources from the mass media. After the data is obtained, it is then analyzed to obtain the data that is sought, then concluded to obtain results related to the data through literature study. The results produced are to ensure that information related to financial management has a significant impact on society, so all information contained on a website must at least meet availability and accessibility standards. Financial reports in the Central Java region are easily accessible from the previous 10 years by the general public, via the official BPKAD website for Central Java Province. The regional government of Central Java Province implements these practices in their financial management, hoping to operate with a high level of transparency in terms of income, expenditure and financial policies, which allows the public to access data related to budgets and program implementation.

1. Pendahuluan

Otonomi daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk bersaing dalam upaya kemandirian daerah, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah. Dengan diterapkannya otonomi daerah, diperlukan peraturan lingkungan hidup yang tepat dan sistem akuntansi yang tepat. Kedua hal tersebut untuk mendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab dengan menggunakan sistem desentralisasi untuk mengelola dana secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel, itulah yang disampaikan oleh. Untuk mewujudkan prinsip tersebut diperlukan pelaporan keuangan yang terintegrasi dengan kesadaran akan tanggung jawab seseorang sebagai pelayan publik nasional. Transparansi dan akuntabilitas fiskal di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terutama disebabkan oleh kemajuan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebagai akibat dari otonomi daerah, yang mengakibatkan perubahan besar dalam komposisi belanja anggaran pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu persyaratan implementasinya adalah melakukan reformasi pelaporan keuangan, dan pemerintah harus mampu memberikan semua informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik untuk memenuhi mandat publik.

Salah satu permasalahan utama yang mendapat perhatian dari berbagai organisasi dan diyakini bertanggung jawab atas tingginya tingkat korupsi di lingkungan birokrasi negara adalah ketidakjelasan praktik pengelolaan keuangan, khususnya di pemerintah daerah. Pendelegasian wewenang kepada daerah untuk mengurus urusannya sendiri disertai pendanaan tampaknya berdampak pada meningkatnya kasus korupsi di daerah. Hal ini misalnya terlihat dari temuan laporan BPK yang menunjukkan bahwa laporan keuangan menunjukkan kerugian yang dialami pemerintah, khususnya pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Misalnya, menurut data tahun 2006, kerugian pemerintah mencapai Rp 6 triliun. Kerugian ini ditemukan dalam laporan pengeluaran anggaran untuk 1.127 kabupaten, kota, dan negara bagian di seluruh negeri. Selain itu, pada tahun yang sama, BPK juga mengidentifikasi pemborosan pelaksanaan anggaran di beberapa daerah sebesar total Rp16,99 triliun. Alasan di balik hal ini adalah rendahnya transparansi administrasi keuangan daerah dalam segala hal mulai dari perencanaan hingga pemantauan.

Mengingat situasi ini, pemerintah telah mengumumkan serangkaian undang-undang dan peraturan yang berfungsi sebagai kerangka kebijakan pengelolaan fiskal daerah, dalam upaya untuk mereformasi keuangan publik daerah. Salah satu fokus reformasi tersebut adalah memberikan akses kepada masyarakat terhadap informasi publik mengenai data keuangan daerah. Hipotesisnya adalah jika masyarakat mempunyai akses terhadap informasi ini, mereka dapat lebih terlibat dalam memantau penggunaan anggaran pemerintah. Seiring dengan meningkatnya transparansi dan semakin luasnya ruang partisipasi masyarakat, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah juga akan meningkat.

2. Metode Penelitian

Tujuan dari dituliskannya artikel ini untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai transparansi pengelolaan keuangan serta memberikan penjelasan mengenai pemanfaatan pengelolaan keuangan kepada masyarakat agar terciptanya kepaahaman pengelolaan keuangan yang ada di Jawa Tengah. Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini yaitu menggunakan studi literatur yang mana metode pengumpulan data ini merupakan mencari studi Pustaka. Metode *library research* ini mencari pada jurnal - jurnal internasional dan nasional yang telah terjamin kredibilitasnya serta menggunakan sumber dari media massa. Setelah data diperoleh kemudian dianalisis untuk mendapatkan sesuatu data yang dicari, kemudian disimpulkan untuk mendapat hasil terkait data melalui studi literatur. (Mestika, 2008)

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Penyusunan Laporan Keuangan Jawa Tengah

Laporan keuangan merupakan media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan bagi manajemen, investor, bank, pemerintah, dan masyarakat umum. Informasi tersebut ditujukan dalam berbagai hal sebagai tujuan, misalnya saja untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi, serta membantu menentukan ketantanan terhadap peraturan perundang-undangan. Pelaporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Setiap entitas pelaporan atau entitas akuntansi wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan secara periodik serta sesuai standar yang telah ditetapkan. (Harahap dkk, 2018)

BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Laporan kinerja tersebut mencakup upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang telah dicapai dalam periode tertentu. Laporan kinerja tersebut juga mencakup keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Keseimbangan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh pengeluaran dapat dibiayai oleh penerimaan. (Sukirno, 2005)

a) Akuntabilitas

Memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara berkala.

b) Manajemen

Mempermudah para pengguna untuk memahami dan menilai pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan, sehingga dapat mendukung perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh sumber daya pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c) Transparansi

Menyediakan informasi keuangan yang lengkap dan akurat kepada masyarakat, karena masyarakat berhak untuk mengetahui secara transparan

dan menyeluruh tentang pengelolaan keuangan negara dan kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan.

- d) **Keseimbangan Antargenerasi**
Menyediakan informasi kepada para pengguna tentang keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah pada periode pelaporan, serta apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
- e) **Evaluasi Kinerja**
Mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas pelaporan dalam menggunakan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah.

3.2 Regulasi Pengelolaan Keuangan di Daerah Jawa Tengah

Regulasi pengelolaan keuangan di Daerah Jawa Tengah dapat mencakup berbagai aspek, termasuk anggaran, belanja daerah, dan pelaporan keuangan. Detailnya dapat ditemukan dalam peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Sumber informasi terkini dan terpercaya dapat diperoleh langsung dari situs resmi pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau instansi terkait di daerah tersebut. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2021 tersebut akan membahas berbagai aspek terkait anggaran pendapatan serta belanja daerah provinsi untuk tahun anggaran 2022. Perda tersebut memuat mengenai:

- a) **Rencana anggaran**
Perda akan merencanakan rencana pengeluaran dan penerimaan dana daerah untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Ini mencakup alokasi anggaran untuk berbagai sektor dan program, termasuk pendapatan pajak, sumber pendapatan lainnya, serta belanja untuk berbagai keperluan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya.
- b) **Prioritas pembangunan**
Dokumen tersebut mungkin menentukan prioritas pembangunan daerah, yang mencakup strategi proyek-proyek yang akan dibiayai menggunakan anggaran tersebut.
- c) **Peraturan pelaksanaan**
Perda juga mungkin berisi peraturan terkait pelaksanaan pengelolaan anggaran, pengawasan, serta prosedur administrasi terkait pelaksanaan anggaran daerah.
- d) **Pertanggungjawaban dan pelaporan**
Perda akan mendefinisikan mekanisme pertanggungjawaban, termasuk pelaporan dan audit keuangan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan transparan.
- e) **Sumber-sumber pendapatan**
Dokumen tersebut mungkin mencakup informasi tentang sumber-sumber pendapatan daerah, termasuk pajak, transfer penerimaan dari pemerintah pusat, dan lainnya.

3.3 Proses Pengelolaan Keuangan di Daerah Jawa Tengah

Proses pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Jawa Tengah, seperti di banyak pemerintah daerah di Indonesia, melibatkan serangkaian langkah dan

tindakan yang dirancang untuk mengelola penghasilan dan belanja daerah dengan efisien, efektif, dan transparan. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pengelolaan keuangan daerah di Jawa Tengah:

- a) **Perencanaan Anggaran**
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah akan merencanakan anggaran untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Hal ini mencakup penentuan prioritas pembangunan, alokasi anggaran untuk berbagai sektor, dan proyek-proyek yang akan didanai.
- b) **Pendapatan Daerah**
Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak dan retribusi, dana transfer dari pemerintah pusat, serta pendapatan asli daerah lainnya. Pengelolaan pendapatan meliputi pengumpulan, pencatatan, dan penyetoran pendapatan yang masuk ke kas daerah.
- c) **Belanja Daerah**
Pengelolaan belanja daerah mencakup alokasi dan penggunaan anggaran untuk berbagai program dan proyek. Ini termasuk proses lelang, pembayaran, dan pemantauan pengeluaran.
- d) **Pertanggungjawaban dan Pelaporan**
Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran daerah kepada pihak yang berwenang. Ini berisi penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.
- e) **Pengawasan dan Audit**
Terdapat badan pengawas keuangan yang bertanggung jawab untuk mengaudit pengelolaan keuangan daerah, memastikan bahwa anggaran yang digunakan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.
- f) **Evaluasi dan Perbaikan**
Proses pengelolaan keuangan daerah terus dievaluasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitasnya. Dari hasil evaluasi, pemerintah daerah dapat melakukan perubahan dan perbaikan dalam pengelolaan keuangan.
- g) **Partisipasi Masyarakat**
Pemerintah daerah di Jawa Tengah juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan anggaran dan pengawasan pengelolaan keuangan daerahnya melalui mekanisme partisipasi masyarakat.

3.4 Tabel Laporan Keuangan di Daerah Jawa Tengah

Laporan keuangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi keuangan yang komprehensif tentang posisi keuangan, kinerja, dan perubahan ekuitas entitas tersebut.

3.4.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan pemerintah yang dibandingkan dengan anggaran. Informasi tersebut dapat digunakan oleh para pengguna untuk menilai keputusan pemerintah dalam mengelola sumber daya ekonomi, serta akuntabilitas dan kepatuhan pemerintah terhadap anggaran.

**PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021**

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2022			31 DES 2021 REALISASI
			ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.				
	Penerimaan Negara Bukan Pajak		47.868.000	70.523.581	147,33	104.574.101
	Jumlah Pendapatan		47.868.000	70.523.581	147,33	104.574.101
B	BELANJA	B.2.				
	Belanja Pegawai	B.2.1.	34.884.640.000	34.304.442.246	98,33	38.072.406.288
	Belanja Barang	B.2.2.	13.640.323.000	13.484.054.725	98,92	9.609.180.911
	Belanja Modal	B.2.3.	3.406.665.000	3.406.359.550	99,99	719.330.380
	Jumlah Belanja		51.931.628.000	51.204.856.521	98,60	49.260.928.579

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Gambar 1. Laporan Realisasi Anggaran Jateng
Sumber: Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah

LRA adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dibandingkan dengan anggaran. Realisasi penerimaan negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp70,5 miliar, atau melebihi anggaran sebesar Rp47,8 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara pada tahun 2022 lebih tinggi dari yang diperkirakan. Realisasi pengeluaran negara sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp51,2 miliar, atau baru mencapai 8,6% dari anggaran sebesar Rp51,9 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pengeluaran negara pada tahun 2022 masih rendah dari yang diperkirakan.

3.4.2 Neraca

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kekayaan, hutang, dan hak milik suatu entitas pelaporan pada suatu tanggal tertentu.

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH			
N E R A C A			
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021			
(dalam Rupiah)			
NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 DES 2022	31 DES 2021
ASET			
ABET LANCAR	C.1.		
- Persediaan	C.1.1.	448.308.708	481.468.275
JUMLAH ABET LANCAR		448.308.708	481.468.275
ABET TETAP	C.2.		
- Tanah	C.2.1.	90.412.497.000	90.412.497.000
- Peralatan dan Mesin	C.2.2.	10.502.047.302	8.551.379.752
- Gedung dan Bangunan	C.2.3.	23.017.099.500	21.551.657.500
- Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	149.213.094	149.213.094
- Akumulasi Penyusutan	C.2.5.	(12.910.458.585)	(11.084.925.207)
JUMLAH ABET TETAP		111.170.398.311	109.580.222.139
ABET LAINNYA	C.3.		
- Aset Tak Berwujud	C.3.1.	197.505.000	197.505.000
- Aset Lain-lain	C.3.2.	0	486.399.348
- Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.3.	(197.505.000)	(859.216.223)
JUMLAH ABET LAINNYA		0	24.888.125
JUMLAH ASET		111.618.707.019	111.686.378.539
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4.		
- Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	129.319.459	83.140.654
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
EKUITAS	C.5.		
- Ekuitas	C.5.1.	111.489.387.560	110.003.237.885
JUMLAH EKUITAS		111.489.387.560	110.003.237.885
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		111.618.707.019	111.686.378.539

Gambar 2. Laporan Neraca Jateng
 Sumber: Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah

Dalam laporan neraca di atas, dipaparkan keadaan keuangan yang meliputi, aset atau aktiva berupa aktiva lancar, aktiva tidak lancar, aktiva tetap dan tidak tetap, liabilitas berupa kewajiban yang harus dibayar, dan ekuitas selama satu tahun terakhir yaitu 31 Desember 2021 sampai dengan 31 Desember 2022. Jumlah per 31 Desember 2022 tercatat sejumlah Rp. 111.618.707.019.00, jumlah tersebut berasal dari aktiva lancar Rp448.308.708.00, kemudian aktiva tetap setelah diakumulasikan penyusutan Rp111. 170.398.311.00 dan aktiva lainnya setelah diakumulasi dengan penyusutan sebesar Rp.0.00 artinya tidak ada yang disusutkan jadi jumlah tetap, karena tidak ada akumulasi penyusutan. Jumlah liabilitas yang harus dibayar adalah Rp129.319.459.00 dan jumlah ekuitas yaitu modal yang berasal dari pemegang saham sendiri per Rp111.489 387 560.00.

3.4.3 Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi informasi seluruh operasional keuangan pelaporan yang terdapat dalam pendapatan Laporan Operasional, beban yang harus dibayar, keuntungan dan kerugian kegiatan suatu pelaporan. Laporan Operasional pun terdapat laporan transaksi keuangan yang berasal dari luar fungsi dan kewajiban entitas keuangan.

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

NAMA PERIKRAAN	CATATAN	31 DES 2022	31 DES 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
D.1			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
- Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1	30.741.303	89.709.278
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1-1)		30.741.303	89.709.278
BEBAN OPERASIONAL			
- Beban Pegawai	D.1.2	34.345.938.546	37.273.735.325
- Beban Persediaan	D.1.2.2	401.465.001	505.505.382
- Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	3.113.743.287	2.730.424.862
- Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	905.414.899	945.129.884
- Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	9.111.275.030	7.027.795.901
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.6	1.848.071.503	1.608.070.360
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.8)		49.726.506.846	50.156.661.714
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1-D.1.2)		(49.695.765.543)	(50.066.952.436)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
D.2			
SURPLUS / (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON LANCAR			
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.2.1	35.759.999	-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non Lancar (D.2.1.1-D.2.1.2)		35.759.999	-
SURPLUS / (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2	4.022.279	104.864.823
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.2.2	-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.2.1-D.2.2.2)		4.022.279	104.864.823
Surplus / (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional (D.2.1+D.2.2)		39.782.278	104.864.823
SURPLUS/(DEFISIT) - LO (D.1+D.2)		(49.655.983.265)	(49.956.087.613)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Gambar 3. Laporan Operasional Jateng

Sumber: Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non-operasional, dan surplus/(defisit) LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.741.3003, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp49.726.506 846,00, sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp49.695 765 543,00 Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp39.782 278.00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp49.655.983.265,00.

3.4.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan terjadinya penurunan atau peningkatan yang terdapat dalam perubahan modal atas adanya kegiatan operasional.

Gambar 4. Laporan Perubahan Ekuitas Jateng

PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(dalam Rupiah)

A	CATATAN	31 DES 2022	31 DES 2021
Ekuitas Awal	E.1	110.003.237.885	110.868.727.093
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	E.2	(49.655.983.265)	(49.956.087.613)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) NILAI EKUITAS			
- Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.1	-	-
Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS			
- Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	51.204.856.521	49.128.855.508
- Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(70.523.581)	(194.574.101)
- Transfer Keluar	E.4.3	-	(11.093.264)
- Transfer Masuk	E.4.4	7.800.000	170.010.262
Jumlah Transaksi Antar Entitas		51.142.132.940	48.099.598.405
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4+E.5)		1.488.149.676	(855.489.208)
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.5	111.489.387.580	110.003.237.885

Sumber: Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Prov Jawa Tengah

Laporan Perubahan Ekuitas atau modal berisi informasi peningkatan dan penurunan perubahan ekuitas dengan membandingkan laporan perubahan ekuitas dengan tahun lalu atau sebelumnya. Pada tanggal 1 Januari 2022 modal sebesar Rp110.003.237.885,00 kemudian dikurangi Defisit-LO karena terjadi penurunan ekuitas sebesar Rp49.655.983.265,00 kemudian dijumlahkan dengan faktor sebagai penyeimbang penyusunan laporan berupa Transaksi Antar Entitas sebesar Rp51.142.132.940,00 sehingga didapatkan Ekuitas atau modal yang dimiliki Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp111 489.387 560,00

4. Kesimpulan

Dalam penerapan *e-governance*, pemerintah kabupaten / kota di Jawa Tengah harus melengkapi website daerahnya dengan konten-konten yang mendukung penerapan *good governance* dalam konsep transparansi. Informasi yang disajikan dalam website setidaknya memenuhi kriteria ketersediaan dan aksesibilitas, sehingga informasi pengelolaan keuangan menjadi informasi yang lebih relevan secara sosial. Laporan keuangan wilayah Jawa Tengah selama 10 tahun terakhir dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas melalui situs resmi BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah menerapkan praktik-praktik dalam pengelolaan keuangan, dengan harapan kegiatan pengelolaan keuangan dapat dilakukan dengan transparan dan terbuka bagi siapapun dalam hal kebijakan keuangan, pendapatan yang diterima bahkan pengeluaran dana untuk kegiatan operasional.

Untuk mempublikasikan informasi keuangan di situs *website* resmi atau laporan transparansi keuangan yang dalam hal itu masyarakat dapat mengakses informasi anggaran dan pelaksanaan program, sehingga pemerintah daerah mengambil tahapan untuk hal tersebut. Upaya pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pengelolaan keuangan merupakan tindakan yang baik dan positif. Karena keterlibatan masyarakat memiliki dampak untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan membuat kebijakan keuangan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Laporan keuangan yang disiplin artinya pengerjaannya dilaksanakan secara tepat waktu memiliki manfaat dan kegunaan sendiri bagi pemerintah daerah yaitu untuk menyusun laporan keuangan secara akurat dan tidak melebihi waktu yang ditetapkan. Hal tersebut, membuat evaluasi pemantauan secara efektif untuk memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia bagi publik atau masyarakat umum. Adanya *website* memberikan kemudahan dalam menyampaikan laporan keuangan kepada masyarakat serta dapat memanfaatkan teknologi yang sudah ada dalam kegiatan keterbukaan informasi atau laporan keuangan. Pemerintah sendiri supaya lebih meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pelaporan keuangan

Referensi

- [1] Azlim, Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi, Banda Aceh: Universitas Syiah, 2012.

- [2] Zed Mestika, Metode penelitian Kepustakaan / Mestika zed, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- [3] Harahap, Sofyan Syafari, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- [4] Sukirno, "Evaluasi Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban Program Diploma III Wates Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta," *Jurnal Pendidikan Akutansi Indonesia*, pp. 1-19, 2005.
- [5] Amanda Y. Kong, Vivian Qingzi Too, Shelly d. Golden, "Thematic Content Analysis of 2010–2015 State Tobacco Control Legislation in the United States: Bill Rationales and Priority Populations," *Preventive Medicine Reports*, vol. 36, p. 36, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2023.102446>
- [6] Yoga Andriyan, "Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, Vols. vol. 3, no. 1, pp. 47-54, 2021. <https://doi.org/10.18196/jpk.v3i1.12847>
- [7] Asri Suwarsih Irwan Taufiq Ritonga, M.Buss, Ph.D, C.A, "Suwarsih, A., Ritonga, I. T., Buss, M., Akuntansi, M., Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Website Pada Pemerintah Daerah di Sumatra," *Accounting and Business Information System Journal*, vol. 5, no. 1, 2017.
- [8] Asri Usman, Hillman Wirawan, Zulkifli, "The Effect Of Human Capital and Physical Capital on Regional Financial Condition:The Moderating Effect of Management Control System. Heliyon," *Heliyon*, Vols. Vol. 7, No. 5, no. 5, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06945>
- [9] Ayupov, A. A., & Kazakovtseva, M. V., "Management of Financial Stability of the Non-Tax Income of Regional Budgets.," *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, p. 187–192, 2014. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.102>
- [10] Chang, Y.Y. Choi, S.-K. Park, B. H. S. Kim, "Regional Demographic Changes and Financial Independence of Local Governments in Korea," . *Asian Journal of Social Science.*, vol. 51, no. 3, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.ajss.2023.05.001>
- [11] Cheng Hu, Yan Wang, "Assessing Regional Economic Growth Through Green Financial Policy: Insights from PSM-DID Model on 107 Cities of China. Heliyon, vol. 9, no. 9, 2023," *Heliyon*, vol. 9, no. 9, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19568>
- [12] Chiara Lodi, Giovanni marin, Marco Modica, "The Public Finance Response to Floods of Local Governments in Italy," *Journal of Environmental Managemen*, vol. 332, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117352>
- [13] Fajarrudin, Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Indonesia: SINTESa : Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora., 2021.
- [14] Fanny Richter, Wladislav Gawenko, Uwe Götze, Michael Hinz, "oward a Methodology for Social Sustainability Assessment: a Review of Existing Frameworks and a Proposal for a Catalog of Criteria," *Schmalenbach Journal of Business Research*, vol. 75, pp. 587-626, 2023. <https://doi.org/10.1007/s41471-023-00174-y>
- [15] Florian Leon, Alexandra Zins, "Regional Foreign Banks And Financial Inclusion: Evidence from Africa. Economic Modelling," *Economic*

- Modelling*, vol. 84, p. 102–116, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.03.012>
- [16] Hu, M., Zhang, J., & Chao, C., "Regional Financial Efficiency and its Non-Linear Effects on Economic Growth in China. I," *International Review of Economics and Finance*, vol. Volume 59, p. 193–206, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2018.08.019>
- [17] Liang Zhang, Wubin Yuan, "Can Local People's Congress Supervision Improve the Expenditure Behavior of Local Governments? Evidence from Provincial Budget Review.," *Heliyon*, vol. 9, no. 12, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22395>
- [18] Maher Alaref, Orwa Al-Abdulla, Zedoun al zoubi, Munzer Al Khalil, Abdulkarim Ekrayez, "Health System Governance Assessment in Protracted Crisis Settings: Northwest Syria," *Health Research Policy and Systems*, vol. 21, no. 1, 2023. <https://doi.org/10.1186/s12961-023-01042-1>
- [19] Marlin Pareda, Jullie J. Sondakh, "Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud," *Jurnal Riset Akuntansi*, vol. 8, no. 2, 2017.
- [20] Mengtao Zhang, Wenchuan Chen, Aidi Kou, Yanjun Wu, "Promotion Incentives, Tenureuncertainty, And Local Government Debt Risk," *Finance Research Letters*, vol. 56, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2023.104136>
- [21] Qiqsong Ruan, Dayong Lv, Xiakun Wei, "High-Speed Rail and Local Government Financing Cost: Evidence from China," *Economic Modelling*, vol. Volume 131, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2023.106618>
- [22] Rachel Etter-Phoya, Chisomo Manthalu, Frank Kalizinje, Farai Chigaru, Bernadetta Mazimbe, Ajib Phiri, Takondwa Chimowa, Wazona Ligomeka, Stephen Hall, Bernadetta o Hare, "Financing child rights in Malawi," *BMC Public Health*, vol. 23, no. 1, 2023. <https://doi.org/10.1186/s12889-023-16319-x>
- [23] Rahel Meili, Tabias Stucki, "Money Matters: The Role Of Money As a Regional and Corporate Financial Resource for Circular Economy Transition at Firm-Level.," *Research Policy*, vol. 52, no. 10, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2023.104884>
- [24] Riswanto, Natak, Analisis Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, Jember: Universitas Jember (UNEJ), 2016.
- [25] Sarmini, H., Afrizal, A., & Artikel, I., "Analisis Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Rokan Hulu.," *HIRARKI Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, vol. Vol. 5/3, no. (Issue 1), 2019. <http://journal.upp.ac.id/index.php/Hirarki>.
- [26] Suryanto, S., "Analysis of Regional Financial Information Systems as a Media of Regional Financial Management Transparency in Indonesia.," *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, Vols. Vol 662, No. 2, 2019. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/662/2/022080>

- [27] Sutrisna, I Wayan, "Regional Financial Management Strategies To Improve The Community Welfare In Bali Province.," *International Journal of Business, Economics and Law*, , Vols. vol. 24, no. 1, no. Issue 1, 2021.
- [28] Syamsul, Syamsul, "Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah (TPKD) di Indonesia.," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, Vols. Vol 20, No. 2, no. 2, pp. 185–204,, 2020. <https://doi.org/10.25105/mraai.v20i2.7105>.
- [29] BPKP Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan Provinsi Jawa tengah laporan keuangan untuk periode tahun 2022, Semarang: BPKP Provinsi Jawa Tengah, 2022.
- [30] Juan Wu, "Analysis of Financial Management, Digital Finance and New Technologies.," *Global Finance Journal*, vol. 57, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.gfj.2023.100869>